

# PELATIHAN TATA KELOLA ORGANISASI DAN ANALISIS KELAYAKAN USAHA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN BAGI BUM DESA DI KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Putu Sukma Kurniawan<sup>1</sup>, I Dewa Gede Anom Jambe Adnyana<sup>2</sup>, Luh Gede Kusuma Dewi<sup>3</sup>,  
Gede Teguh Prasetya Muttiwijaya<sup>4</sup>, I Gede Putu Banu Astawa<sup>5</sup>, Ni Luh Putu Ayu Lastri  
Pramiswari<sup>6</sup>

1,2,3,4,5,6Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha  
Email:putusukma@undiksha.ac.id

## ABSTRACT

*The Village-Owned Enterprises (VOEs) is an institution that plays a central role in driving and improving the economy in villages. The existence of VOEs can have a significant impact on economic growth in villages. Currently, there are many VOEs organisations in existence and they are developing very well with the legalisation of VOEs as a legal entity. Based on initial observations of VOEs in Banjar Sub-district, several issues have been identified that require immediate attention. First, the suboptimal governance of VOEs organisations is one of the factors hindering the success of the programmes being implemented. Several VOEs in Banjar Sub-district show that their financial condition and business activities are not yet optimal. Second, the inability of VOEs management to conduct feasibility analyses for new businesses is also a serious issue. Without the ability to analyse market potential, community needs, and other factors that influence business success, VOEs will struggle to develop new businesses that can support food security programmes. This Community Service Activity began with the initial stage of identifying VOEs partners in the Banjar sub-district. The results of this activity showed that the management of VOEs was able to develop strategies to improve the quality of organisational governance and identify business opportunities related to food security issues.*

**Keywords:** business feasibility analysis training, food security programmes, organisational management training, village-owned enterprises

## ABSTRAK

Organisasi bisnis BUM Desa merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengerakkan dan meningkatkan perekonomian di desa. Eksistensi BUM Desa dapat memberikan dampak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi di desa. Saat ini, kuantitas BUM Desa yang telah eksis sangat banyak dan perkembangannya sangat baik dengan disahkannya BUM Desa menjadi sebuah organisasi berbadan hukum. Berdasarkan hasil observasi awal pada BUM Desa di Kecamatan Banjar, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dan perlu segera untuk diatasi. Pertama, tata kelola organisasi BUM Desa yang belum optimal menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan program-program yang dijalankan. Beberapa BUM Desa di wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan aktivitas bisnis yang dijalankan belum maksimal. Kedua, manajemen BUM Desa yang belum mampu melakukan analisis kelayakan usaha baru juga merupakan masalah yang cukup serius. Tanpa adanya kemampuan untuk menganalisis potensi pasar, kebutuhan masyarakat, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan usaha, BUM Desa akan kesulitan dalam mengembangkan usaha baru yang dapat mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan PkM ini diawali dari tahap penjajagan mitra BUM Desa di Kecamatan Banjar. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa manajemen dari BUM Desa telah mampu untuk menyusun strategi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan mengidentifikasi potensi bisnis yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan.

**Kata kunci:** badan usaha milik desa, pelatihan analisis kelayakan usaha, pelatihan tata kelola organisasi, program ketahanan pangan

## PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal (Pradnyani, 2019). BUM Desa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya lokal guna mendukung pembangunan berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). Begitu pula dukungan langsung dari Program Asta Cita Presiden yang menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa, yang mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk sektor ketahanan pangan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022). Dalam konteks ini, BUM Desa memainkan peran yang sangat penting, karena tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan sumber daya, tetapi juga dalam menganalisis kelayakan usaha yang dijalankan (Faedlulloh, 2018). Untuk memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan, BUM Desa harus memiliki kemampuan dalam melakukan studi kelayakan yang komprehensif, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Anggraeni, 2016).

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, menjadi salah satu daerah dengan perkembangan BUM Desa yang bervariasi. Beberapa BUM Desa telah mengalami kemajuan dalam pengelolaan usaha berbasis sektor pertanian, pariwisata desa, dan perikanan (Susanto et al., 2023). Tantangan masih dihadapi oleh banyak BUM Desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan usaha, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, transparansi tata kelola, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan model bisnis berkelanjutan (Widodo & Santoso, 2022). Literasi digital yang masih rendah dan minimnya akses terhadap pelatihan manajerial juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing BUM Desa

(Ayuningtyas & Wibawani, 2022; Chintary & Lestari, 2016). Berdasarkan hasil observasi awal pada BUM Desa di Kecamatan Banjar, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dan perlu segera untuk diatasi. Pertama, tata kelola organisasi BUM Desa yang belum optimal menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan program-program yang dijalankan. Beberapa BUM Desa di wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan aktivitas bisnis yang dijalankan belum maksimal. Kedua, manajemen BUM Desa yang belum mampu melakukan analisis kelayakan usaha baru juga merupakan masalah yang cukup serius. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada manajemen BUM Desa untuk penguatan tata kelola organisasi BUM Desa dan pemahaman dalam analisis kelayakan usaha baru (Yuliana & Alinsari, 2022).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi elemen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ayuningtyas & Wibawani, 2022). Peran BUM Desa semakin penting seiring dengan kebijakan alokasi Dana Desa, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). Namun, efektivitas implementasi program ini bergantung pada kualitas tata kelola usaha, transparansi pengelolaan keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini (Napitupulu et al., 2022). Kasus korupsi yang terjadi di Kecamatan Banjar pada tahun 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas operasional BUM Desa di wilayah tersebut. Adanya kasus ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan perkembangan BUM Desa di Kecamatan Banjar. Hal ini sangat krusial mengingat secara karakteristik, BUM Desa adalah organisasi

bisnis lokal desa yang sangat tergantung dengan modal sosial (Ramadana *et al.*, 2013).

Pemulihan dan pengembangan usaha BUM Desa di Kecamatan Banjar menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan akses pendanaan, serta kurangnya keterampilan manajerial dalam mengelola usaha. Upaya restrukturisasi manajemen telah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala dalam menyusun strategi bisnis yang berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal (Susanto *et al.*, 2023). Hambatan utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi digital, belum optimalnya sistem akuntabilitas keuangan, serta rendahnya daya saing usaha BUM Desa dalam sektor pertanian dan pariwisata desa (Anggraeni, 2016; Pradnyani, 2019; Yuliana & Alinsari, 2022). Dengan demikian, maka diperoleh dua permasalahan potensial yang perlu diselesaikan pada BUM Desa di Kecamatan Banjar, yaitu (1) belum kuatnya pemahaman dan pengetahuan manajemen BUM Desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi BUM Desa dan (2) belum adanya pengetahuan dan kemampuan dari manajemen BUM Desa untuk melakukan analisis kelayakan usaha baru yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Tata kelola organisasi yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat (Anggraeni, 2016; Yuliana & Alinsari, 2022). Hal ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUM Desa serta mempermudah pengelolaan sumber daya secara profesional (Faedlulloh, 2018). Untuk mencapai hal tersebut, pelatihan berbasis kebutuhan spesifik BUM Desa menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola usaha (Sari, 2021).

Civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kompetensi manajemen BUM Desa melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kegiatan pelatihan tata kelola organisasi, pendampingan analisis kelayakan usaha, serta pengembangan sistem manajemen berbasis digital menjadi bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional BUM Desa (Widodo & Santoso, 2022). Kajian akademik dan riset terapan memberikan rekomendasi berbasis data guna memastikan pengelolaan usaha berjalan secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan dalam konteks desa (Hidayat, 2021).

## METODE

Pelaksanaan PkM dengan skim pengembangan IPTEKS yang mengambil tema mengenai penguatan tata kelola organisasi BUM Desa dan peningkatan kompetensi manajemen BUM Desa dalam melakukan analisis kelayakan usaha untuk mendukung program ketahanan pangan ini dilakukan pada BUM Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini diawali dari tahap penjajagan mitra BUM Desa di Kecamatan Banjar. Penjajagan ini membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus mengundang manajemen BUM Desa untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan materi serta persiapan pelatihan dan pendampingan. Pemberian pelatihan dan pendampingan dengan materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim PkM. Pelatihan akan dilaksanakan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang sangat baik di tim PkM serta difokuskan dalam satu hari dan pendampingan akan difokuskan pada hari lainnya agar sesuai dengan kebutuhan dari manajemen BUM Desa. Fokus dari kegiatan PkM ini adalah keberlanjutan program dimana tim PkM akan memastikan bahwa manajemen BUM Desa akan terus memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola

organisasi dan analisis kelayakan usaha baru meskipun program kegiatan PkM telah selesai dilaksanakan.

Beberapa contoh materi pelatihan mengenai tata kelola organisasi BUM Desa dan analisis kelayakan usaha baru untuk mendukung program ketahanan pangan adalah

1. Materi mengenai struktur organisasi BUM Desa yang mencakup pembahasan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengurus dan anggota. Materi akan disiapkan oleh tim PkM dan dikolaborasikan dengan materi yang terdapat di laman <https://bumdes.id/> dan <https://bumdes.kemendesa.go.id/>.
2. Materi mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pelaporan yang efektif agar BUM Desa dapat dikelola dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta pemangku kepentingan.
3. Materi mengenai perencanaan strategis BUM Desa yang mencakup cara menyusun rencana bisnis yang realistik dan berkelanjutan.
4. Materi mengenai perhitungan analisis kelayakan usaha baru, misalnya perhitungan mengenai *IRR* dan *NPV* dalam menilai kelayakan sebuah usaha. Tim PkM telah menyusun berkas perangkat lunak untuk membantu manajemen BUM Desa dalam menghitung analisis kelayakan usaha. Materi tim PkM dikolaborasikan dengan

materi yang terdapat di laman <https://www.investopedia.com/ask/answers/05/npv-irr.asp> dan <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/npv-vs-irr/>.

Pelatihan di kegiatan PkM ini juga akan melakukan monitoring dan pendampingan pasca dilakukannya pelatihan. Monitoring dan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen BUM Desa mampu untuk menyusun strategi dan program kerja yang berfungsi untuk menguatkan tata kelola organisasi dan kelembagaan dari BUM Desa. Selain itu, kegiatan monitoring dan pendampingan juga krusial untuk memastikan bahwa manajemen BUM Desa telah mampu untuk melakukan perhitungan dari analisis kelayakan usaha yang baru dalam konteks ketahanan pangan. Kegiatan monitoring dan pendampingan akan dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah Kecamatan Banjar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng sehingga kolaborasi semua pemangku kepentingan dapat terus dilakukan.

Sesuai dengan tahapan kegiatan PkM yang telah dijelaskan sebelumnya, maka alur pemikiran kegiatan tersebut akan disajikan dalam bagan alir di Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir kegiatan pengabdian pada masyarakat

Sumber: Tim PkM (2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 dengan bertempat di Aula Kantor Kepala Desa, Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Peserta yang hadir dalam kegiatan PkM adalah kepala desa, manajemen BUM Desa, perwakilan dari *subak*, dan perwakilan dari masyarakat desa. Pada sesi pertama, tim PkM menyampaikan materi mengenai bagaimana tata cara untuk menguatkan organisasi BUM Desa. Materi disampaikan dengan berfokus pada peningkatan tata kelola BUM Desa di Kecamatan Banjar. Manajemen BUM Desa diberikan pemahaman mengenai filosofi dan makna dari tata kelola. Materi kedua berfokus pada cara-cara untuk melakukan analisis kelayakan usaha yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Pada sesi ini, manajemen BUM Desa dilatih untuk mampu mengidentifikasi potensi desa kemudian melakukan analisis usaha baru yang berhubungan dengan potensi di desa.



Sumber: Tim PkM (2025)



25

Gambar 3. Pemberian materi tata kelola organisasi  
Sumber: Tim PkM (2025)

Pada saat sesi materi, peserta kegiatan PkM sangat antusias untuk melakukan diskusi. Diskusi-diskusi yang muncul pada dasarnya merupakan gambaran faktual dari permasalahan yang ada di lapangan. Misalnya, manajemen BUM Desa dari Desa Temukus menyampaikan bahwa manajemen merasa sulit untuk menerjemahkan analisis kelayakan usaha pada program ketahanan pangan. Hal ini misalnya karena belum ada aturan jelas dan petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh manajemen BUM Desa dalam menjalankan bisnis baru yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, manajemen BUM Desa akhirnya merancang bisnis di bidang pertanian yang melibatkan kelompok *subak*. Pelibatan kelompok *subak* ini sangat penting agar kelompok masyarakat dapat juga terlibat dalam program ketahanan pangan dan membangun ikatan sosial yang kuat dengan manajemen dari BUM Desa.



Gambar 4. Pemberian materi analisis kelayakan usaha  
Sumber: Tim PkM (2025)



Gambar 5. Tim pengabdi dan kelompok masyarakat sasaran

Sumber: Tim PkM (2025)

Pada saat sesi materi mengenai analisis kelayakan usaha, peserta kegiatan PkM berdiskusi mengenai perhitungan untuk analisis kelayakan usaha sampai mendapatkan simpulan apakah usaha tersebut layak atau tidak. Untuk menjawab permasalahan dari manajemen BUM Desa, tim PkM menampilkan sebuah contoh perhitungan yang dapat dipakai sebagai acuan oleh manajemen BUM Desa.

Evaluasi kegiatan PkM ini dirancang untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi pengelola BUM Desa dalam memperkuat tata kelola organisasi BUM Desa serta mengoptimalkan kontribusi BUM Desa dalam ketahanan pangan desa melalui analisis kelayakan unit usaha baru. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mencakup metode observasi, wawancara, survei, serta analisis dokumen.

Pada tahap *pre-evaluation*, dilakukan identifikasi awal terhadap kondisi BUM Desa di Kecamatan Banjar, khususnya terkait kapasitas pengelola dan pengetahuan awal dari manajemen BUM Desa, sistem tata kelola eksisting di BUM Desa, serta keberlanjutan usaha yang sedang dijalankan, khususnya pada unit usaha yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Survei awal dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman manajemen BUM Desa

mengenai manajemen usaha, penyusunan rencana bisnis, strategi pemasaran, serta transparansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik dari BUM Desa. Selain itu, analisis *baseline* terhadap penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan akan dilakukan guna memahami sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung usaha BUM Desa di Kecamatan Banjar. Pada tahapan ini, diperoleh hasil bahwa manajemen BUM Desa belum terlalu memahami bagaimana strategi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan tata kelola organisasi. Selain itu, manajemen juga belum mampu untuk menyusun sistem pengendalian internal yang mampu untuk mengurangi terjadinya potensi kecurangan keuangan. Dari sisi analisis kelayakan usaha, diperoleh pemahaman bahwa manajemen BUM Desa mampu untuk melakukan perhitungan kelayakan usaha namun pada level yang sederhana.

Selama pelaksanaan kegiatan (*ongoing evaluation*), pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sesi pelatihan dan pendampingan berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta. Observasi langsung digunakan untuk menilai keterlibatan peserta dalam diskusi dan praktik penyusunan program kerja untuk penguatan tata kelola BUM Desa dan dalam melakukan analisis kelayakan usaha baru. Umpaman balik dari peserta dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara guna mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang diberikan. Selain itu, efektivitas skema pemberdayaan masyarakat dinilai melalui partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan oleh BUM Desa (khususnya pada program-program yang berhubungan dengan ketahanan pangan), baik dalam aspek perencanaan maupun pengelolaan usaha. Pada tahapan ini, tim PkM telah memberikan kuisioner dan melakukan wawancara singkat dengan peserta dari kegiatan PkM. Diperoleh hasil bahwa peserta dari kegiatan PkM telah memiliki peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang cukup signifikan dalam topik

penguatan tata kelola dan analisis kelayakan usaha.

Pada tahap *post-evaluation*, dilakukan penilaian terhadap dampak kegiatan melalui perubahan yang terjadi dalam pengelolaan BUM Desa. Evaluasi difokuskan pada peningkatan kompetensi dari manajemen BUM Desa dalam menyusun program-program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi dari BUM Desa. Hasil pelatihan diukur berdasarkan indikator keberhasilan, seperti jumlah peserta yang mampu menjelaskan pentingnya tata kelola organisasi bagi perkembangan BUM Desa dan seberapa besar peningkatan kompetensi dari manajemen BUM Desa untuk melakukan perhitungan pada analisis kelayakan usaha baru yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Dari hasil pada tahapan ini, telah diperoleh indikator-indikator pencapaian yang telah dimiliki oleh peserta kegiatan PkM, yaitu

1. Peserta telah mampu untuk memahami makna dari penguatan tata kelola organisasi;
2. Peserta telah mampu untuk mengidentifikasi beberapa hal yang akan dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecurangan keuangan;
3. Peserta telah mampu untuk memahami pentingnya analisis kelayakan usaha baru;
4. Peserta telah mampu untuk melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang penting dalam analisis kelayakan usaha baru.

## SIMPULAN

Secara umum, kegiatan PkM dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh khalayak sasaran. Dalam konteks ini, kegiatan PkM dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari manajemen BUM Desa untuk menyusun strategi-strategi yang dapat dipergunakan dalam rangka penguatan tata kelola organisasi serta

menambah pengetahuan dari manajemen BUM Desa agar mampu untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan analisis yang memadai untuk identifikasi kelayakan usaha baru yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Kegiatan PkM ini juga merupakan sebuah implementasi dari program Kampus Berdampak dimana esensi dari program ini adalah akademisi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memberikan solusi serta jawaban atas permasalahan yang dialami oleh komunitas sosial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUM Desa di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS, 28(2).
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, 13(3), 281–286. <https://doi.org/10.31258/JKP.V13I3.8095>
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(2).
- Faedlulloh, D. (2018). BUM Desa dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. Journal of Governance, 3(1). <https://doi.org/10.31506/JOG.V3I1.3035>
- Hidayat, R. (2021). Strategi Penguatan Manajemen BUM Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal. Jurnal Ekonomi Desa, 6(2), 134-150.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Kebijakan Pembangunan Desa Berkelanjutan. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Laporan Tahunan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1), 1–11. <https://publisher.yccm.or.id/index.php/cishum/article/view/41>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Pradnyani, N. L. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.36733/JUARA.V9I2.602>
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Lndungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.

- Sari, D. P. (2021). Peningkatan Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan Usaha Desa: Studi Kasus pada BUM Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(3), 221-239.
- Susanto, A., Wijaya, T., & Rahman, M. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Evaluatif pada BUM Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(2), 175-190.
- Widodo, H., & Santoso, B. (2022). Analisis Kelayakan Usaha dalam Pengembangan BUM Desa Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 12(4), 310-328.
- Widodo, T., & Santoso, B. (2022). *Analisis Kelayakan Usaha dan Pengembangan Ekonomi Desa*. Malang: UB Press.
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2919–2929. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I3.945>